

PROBLEMATIKA PARTAI POLITIK ISLAM DI INDONESIA

MAKALAH

disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Politik Hukum Islam

Dosen Pengampu :

Dr. Ija Suntana, M. Ag.



Oleh :

Rifna Cendikia 1213010144

JURUSAN HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG 2022

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullohi Wabarokatuh

Segala rasa puja dan puji syukur atas kuasa Allah swt yang selalu mengasihi dan menganugerahkan karunia berupa kekuatan dan kasih-Nya sehingga makalah dengan judul “Problematika Partai Politik Islam di Indonesia” dapat diselesaikan dengan baik.

Dan terkhusus kepada Bapak Dr. Ija Suntana, M.Ag. selaku dosen Politik Hukum Islam yang sudah memotivasi dan mengedukasi selama satu semester ini. Juga Triliyunan terima kasih saya layak haturkan kepada semua pihak yang terkait dalam memberikan sumbangsih baik berupa pemikiran ataupun yang lainnya demi kualitas makalah ini .

Makalah ini merupakan refleksi dari pertanyaan yang terlintas di kepala penulis melihat minimnya eksistensi partai politik Islam saat ini jika dibandingkan dengan partai nasionalis, penulis juga berusaha agar buah pemikiran ini dapat menjadi sebuah bahan diskusi untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas dan semoga makalah ini dapat menjadi manfaat bagi diri penulis sendiri terutama dan untuk semua. Wassalam.

Palembang, 2 Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2	
DAFTAR ISI	3	
BAB I		4
PENDAHULUAN	4	
1.1. Latar Belakang	4	
1.2. Rumusan Masalah	4	
1.3. Tujuan Pembahasan	4	
BAB II	5	
PEMBAHASAN	5	
2.1. Pengertian Partai Politik dan Partai Politik Islam	5	
2.2. Turunnya Eksistensi Partai Politik Islam	5	
2.3. Faktor Penyebab Kalahnya Partai Politik Islam	6	
2.4. Partai Politik Islam Saat Ini	8	
2.5. Pandangan Islam dalam Berpolitik	8	
BAB III	10	
PENUTUP	10	
Kesimpulan	10	
Kritik dan Saran	10	
Daftar Pustaka	11	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketika Indonesia genap berusia sepuluh tahun, tepatnya tahun 1955, pemilihan umum resmi digelar yang diikuti oleh tiga puluhan parpol atau partai politik di Indonesia termasuk partai politik Islam yang kala itu yang turut ikut andil dalam pesta demokrasi kala itu. Sederetan partai politik Islam tersebut diantaranya PSII, PNU, Masyumi dll. Salah satu partai politik Islam termasyhur di zaman itu ialah partai Masyumi yang menjadi wadah bersatunya organisasi masyarakat Islam dan menjadi salah satu partai terkuat yang berorientasi pada agama Islam sebelum akhirnya dibubarkan oleh presiden Soekarno karena dianggap ada keterlibatan dalam gerakan separatis PRRI. Pada tahun-tahun berikutnya pun pemilu sudah dihapus pelaksanaannya yang menandakan bahwa demokrasi telah mati di Bumi Pertiwi.¹ Pembubaran ini juga berbuntut panjang dengan terbentuknya Front Nasional yang awalnya ditujukan untuk menampung semua aspirasi dari berbagai golongan, akhirnya dimanfaatkan tokoh-tokoh PKI yang banyak berpartisipasi di dalam keanggotaan Front Nasional untuk menggulingkan NKRI.

Setelah pemilu kembali diadakan, yakni tepatnya enam belas tahun setelah pemilu pertama kali serta pemilu-pemilu berikutnya, justru partai-partai politik yang berasaskan Islam mengalami penurunan yang terbilang cukup signifikan. Hingga saat ini hanya ada empat yang masih bertahan dari puluhan parpol Islam yang terhitung sejak masa awal reformasi. Ini menandakan adanya permasalahan baik dari segi internal maupun eksternal yang mengakibatkan turunnya eksistensi dan peran partai politik Islam dalam dunia perpolitikan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja penyebab turunnya eksistensi parpol Islam di Indonesia?
2. Bagaimana peran parpol Islam di Indonesia pada saat ini?

1.3 Tujuan Pembahasan

1. Untuk mengetahui penyebab turunnya eksistensi parpol Islam di Indonesia.
2. Untuk mengetahui peran parpol Islam di Indonesia pada saat ini.

¹ Sunarso, *Membedah Demokrasi : Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia* ,(Yogyakarta : UNY Press,2015) hal. 59.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Partai Politik dan Partai Politik Islam

Partai adalah wadah yang berisi sekumpulan personal yang memiliki haluan atau tujuan yang sama terkhusus di bidang politik². Dalam salah satu halaman buku “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, parpol merupakan suatu golongan yang terstruktur dimana para personal yang bernaung di dalamnya memiliki orientasi dan haluan yang sama, yakni berusaha untuk mendapat kekuasaan politik dan mengkoordinir kedudukan politik yang biasanya diperoleh dengan cara konstitusional untuk melakukan kebijakan-kebijakan mereka.³ Jadi, partai politik dapat terbentuk karena adanya kesepakatan dari beberapa kelompok rakyat Indonesia dikarenakan adanya persamaan persepsi, tujuan, orientasi, cita-cita dan haluan guna memperjuangkan kepentingannya dalam bidang politik pada pemilihan umum dan tentunya disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai badan hukum.

Sedangkan partai politik Islam adalah organisasi politik bagi umat Islam di Indonesia yang berorientasi pada *Kitabullah dan Sunnah Rasul* sebagai sumber hukumnya yang bertujuan untuk memperjuangkan cita-cita umat Islam dalam suatu negara. Di Indonesia sendiri, partai-partai politik Islam atau yang berasaskan Islam diantaranya yaitu PKS, PBB, PPP, dll. Sebagaimana perlu diketahui juga bahwa partai politik di Indonesia ada yang merupakan parpol nasionalis dan parpol Islam.

2.2 Turunnya Eksistensi Partai Politik Islam

Parpol Islam sejatinya mempunyai catatan penting di era reformasi, tepatnya saat lengsernya Soeharto pada tahun 1998. Pada tahun itu dihilangkannya batas pembentukan partai politik, maka berlomba-lombalah ormas-ormas Islam untuk membuat partai politik baru guna mendominasi jalannya pemilu 1999 bahkan terdapat empat puluh dua partai politik Islam yang mendaftar sebagai peserta pemilu, dari empat puluh dua partai Islam, terpilihlah dua puluh partai Islam yang menjadi peserta pemilu 1999. Kesempatan ini dapat dijadikan partai politik Islam untuk menunjukkan eksistensinya sebagai pengekspresian aspirasi dari golongan umat Islam.

Namun, cita-cita partai Islam untuk mendominasi pemilu 1999 tidak berjalan sesuai harapan, dari dua puluh partai yang bertarung di pemilu 1999, partai-partai Islam hanya memperoleh tiga puluh tujuh persen suara. Ini menjadi tanda kurangnya dukungan masyarakat terhadap partai politik Islam meskipun masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Kegagalan partai politik Islam ini tentu mengubur harapan pimpinan partai Islam untuk menduduki dan mendominasi kekuasaan. Hal tersebut dinilai sulit mengingat turunnya eksistensi partai Islam

² Marbun. BN, *Kamus Politik*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2004), hlm 402

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta ; Gramedia Pustaka Utama, 1993) hlm 160

dan pandangan rakyat Indonesia yang dinilai cenderung lebih memihak ke partai-partai nasionalis seperti PDIP dan Golkar.

Di era reformasi, kebijakan Presiden Habibie yang dinilai terlalu longgar dalam membuka ruang demokrasi di era reformasi ini berdampak negatif dengan lahirnya kelompok-kelompok radikal di samping banyak lahirnya partai-partai Islam. Berbagai kelompok radikal yang mengatasnamakan Islam mulai muncul satu persatu dengan berbagai tujuan, mulai dari mendirikan negara Islam, menimbulkan teror atas dasar jihad, dan lain sebagainya. Kebijakan presiden lantas menimbulkan risiko besar dengan adanya kelompok-kelompok radikal yang bertentangan dengan tujuan demokrasi serta menjadi momok tersendiri bagi transisi demokrasi di Indonesia.

Hingga saat ini parpol-parpol yang berlafaz Islam dinilai kalah saing dengan partai-partai nasionalis walaupun pernah bangkit setelah pengusungan Gus Dur yang disponsori oleh ormas-ormas Islam dan kaum santri untuk kembali mengedepankan partai Islam di kancah persaingan politik, bahkan beberapa partai politik Islam melakukan berbagai koalisi dengan partai nasionalis padahal jika ditinjau dari segi haluan sudah terdapat perbedaan. Akhirnya, keterpurukan partai-partai Islam terlihat pada pemilu 2009 ketika hanya memperoleh dua puluh sembilan koma dua persen suara dibanding total suara pada pemilu 2004 yang berjumlah empat puluh satu persen. Keadaan yang merosot tajam ini kembali menguatkan persepsi tidak adanya sinkronisasi antara mayoritas keagamaan yang dianut masyarakat Indonesia dengan perolehan suara partai politik Islam.

Bahkan jika dipetakan perjalanan partai-partai politik Islam, dari awal mula dilaksanakannya pemilu, partai-partai politik Islam selalu kalah dalam perolehan suara dan diprediksi bakal terus menurun karena semakin berkurangnya minat masyarakat terhadap visi dan misi partai politik Islam tersebut. Tentunya terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat berkembangnya partai politik Islam saat ini baik dari segi internal maupun segi eksternal.

2.3 Faktor Penyebab Kalahnya Partai Politik Islam

Pemilu 2024 mulai bergaung di berbagai penjuru di Indonesia, berbagai elit politik dari berbagai kalangan mulai bersiap mengangkat peralatan politik guna memenangkan suara rakyat. Dari kekalahan-kekalahan sebelumnya, partai-partai politik Islam harus berbenah dan melakukan introspeksi segera melihat tergerusnya suara yang berpihak pada partai politik Islam.

Dilihat dari beberapa kali pemilu dilaksanakan, nampak terjadi permasalahan internal dan eksternal yang serius dan harus ditangani secepat mungkin. Ada banyak faktor diantaranya, yaitu: *Pertama*, Rakyat Indonesia saat ini belum mempunyai pengetahuan yang bisa mendorong dan menarik minat mereka untuk memihak partai-partai berbasis Islam. Dalam artian kesadaran politik yang tinggi belum dimiliki masyarakat. Fenomena ini dapat dimaklumi karena sistematis umat mengalami proses membedakan kehidupan bernegara dengan kehidupan beragama atau disebut dengan sekularisasi. Agama hanya dijadikan simbol hubungan manusia dengan Tuhan atau *hablumminallah* saja yang pada akhirnya umat muslim di Indonesia hanya berfokus pada urusan akidah dan akhlak.

Proses pemisahan ini tidak mencerminkan pemahaman bahwa Islam adalah agama yang mengatur segala macam persoalan dari mulai politik, ekonomi, akhlak, sosial, pendidikan dan lain sebagainya dalam artian cakupan Islam menyeluruh di segala aspek.

Kedua, Ideologi asing yang mulai menyerbu pemikiran umat Islam. Ideologi dari barat seperti kapitalisme, sekularisme, dan liberalisme secara brutal merasuki pemikiran umat Islam dan tanpa melakukan kritisasi, umat Islam langsung menerima dan dijadikan ideologi berbangsa dan bernegara sehingga keberpihakan kepada partai-partai Islam menjadi minim dan bertolak belakang. Konsep ideologi agama ditinggalkan dan dianggap tidak penting bagi kemaslahatan umat Islam sendiri bahkan beberapa tokoh intelektual muslim dengan terang-terangan menolak partai Islam.

Ketiga, Faktor internal partai itu sendiri yang tak mampu menjamin dan menopang aspirasi umat Islam. Ketidakmampuan dalam melayani umat sejatinya mengurangi rasa percaya dalam memilih partai Islam padahal partai tersebut telah mengastaskan Islam untuk menjadi haluannya⁴.

Faktor internal seharusnya diperbaiki terlebih dahulu karena fenomena kecenderungan tokohtokoh politik sangat tampak tidak bersatu dewasa ini setelah terjadinya pergesekan yang disebabkan saling mencurangi dan saling mengalahkan diantara satu golongan dengan golongan lain baik dalam pemilihan anggota kepengurusan maupun perebutan kekuasaan di tubuh partai itu sendiri. Contohnya dalam tubuh PKS sendiri terpecah kepada golongan keadilan dan golongan sejahtera. Selan itu, faktor terlibatnya tokoh-tokoh parpol Islam dalam kasus korupsi juga mempengaruhi suara rakyat yang diperoleh parati politik Islam. PKS yang tampil dengan membawa prinsip dasar bersih, peduli, dan profesional harus jatuh wibawanya dengan terseretnya Lutfhi Hasan Ishak pada kasus tindak pidana korupsi pada saat ia tengah menjabat sebagai Ketua partai. Hal tersebut dinilai tidak mencerminkan prinsip-prinsip yang dipegang PKS sebagai partai politik Islam yang menjunjung tinggi gerakan anti-korupsi. Hal tersebut justru menjadi senjata partai-partai lain yang berbasis nasionalis untuk menjatuhkan lawan politiknya dengan menyebarkan stigma-stigma buruk di tubuh parpol Islam, khususnya PKS.

Lalu, partai-partai nasionalis melebarkan sayap partai dengan mengisinya dengan tokohtokoh Islam, partai politik nasionalis mempunyai sayap-sayap Islam sebagai ladang suara yang mampu menarik simpati masyarakat dengan adanya tokoh-tokoh Islam tersebut. Langkah tersebut diaplikasikan dengan mendirikan organisasi Islam, Golkar yang pertama melakukannya dengan menjadikan mantan ketua PB HMI Akbar Tanjung sebagai ketua umum partai pada tahun 1998 kemudian mendirikan Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) yang disinyalir dapat memberikan tambahan gelombang suara.

⁴ Deliar Noer, dkk, *Mengapa Partai Islam Kalah?: Perjalanan Politik Islam dari Pra-Pemilu '99 sampai Pemilihan Presiden*. (Jakarta : Alvabet, 1999) hlm 158-159

2.4 Partai Politik Islam Saat Ini

Partai politik saat ini hanya tinggal nama, lambang-lambang partai yang terdapat ka'bah, bulan bintang dan lain sebagainya hanya simbolis biasa, tak mencerminkan keadaan kelompok yang bernaung di dalamnya. Partai politik Islam yang seharusnya memiliki visi dan misi yang jelas justru tidak mewakili umat muslim dalam menyampaikan aspirasinya. Partai politik Islam yang menjadi pioner penting dalam memelihara dan melestarikan syariat Islam justru menjadi pelaku utama terhadap pelanggaran syariat Islam. Perebutan kekuasaan di pusat maupun di daerah menjadikan antar parpol Islam berseteru dan silang pendapat. Profesionalitas yang dijunjung hanya omong kosong, kepentingan yang diutamakan adalah kepentingan pribadi saja bahkan akademisi UMY yang merupakan pakar sosiologi politik mengungkapkan bahwa parpol-parpol saat ini terkesan bersifat feodal dan ingin membangun dinasti sendiri bersama para golongan elit dari partainya dan partai tersebut bukan milik umat melainkan milik kelompok tertentu yang berkecimpung di dalam partai saja.

Pemeliharaan syariat Islam di Indonesia diwujudkan dalam bentuk internalisasi di masyarakat. Internalisasi adalah upaya penyampaian syariat Islam dari satu generasi ke generasi lainnya melalui metode pengajaran baik informal maupun formal⁵. Partai politik Islam harusnya dapat memanfaatkan metode ini untuk kembali meyakinkan rakyat dan kembali tampil dengan visi dan misi yang jelas. Dewasa ini sangat susah membedakan antara partai nasionalis dan partai Islam seiring dengan kesamaan pemberlakuan keduanya di Indonesia. Partai-partai Islam dan nasionalis sama-sama diisi orang-orang Islam, hanya tinggal kualitas kinerja dan kepercayaan publik yang menjadi penentu. Hingga saat ini, pelaku korupsi dan penggelapan dana negara tidak hanya dilakukan partai nasionalis saja, bahkan partai Islam pun ikut terlibat di dalamnya, inilah contoh orang-orang yang pada dasarnya tidak bekerja di atas nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan.

Maraknya perilaku saling memfitnah dengan mengerahkan *buzzer* sebagai sarana menjatuhkan lawan politik pun tak luput dalam persaingan individu atau pun golongan dalam merebut posisi kekuasaan. Partai politik Islam pada saat ini juga mudah sekali diadu domba yang pada akhirnya memihak golongan yang berseberangan.

2.5 Pandangan Islam dalam Berpolitik

Politik selalu ramai dan gaduh dibicarakan di Indonesia, apalagi jika memasuki tahun-tahun pemilu dan perbincangan mengenai politik tak akan pernah sepi dimanapun sampai dalam konteks candu dan tidak. Islam tidak melarang pemeluknya untuk berpolitik bahkan mengajarkan tata cara politik yang sesuai agama Islam. Bagaimana agama Islam mengatur hal-hal terkecil mulai dari masuk WC, masuk rumah, dan lain sebagainya. Tentunya Islam pun mengatur hal yang menyangkut masalah berbangsa dan bernegara. Tetapi dalam sisi yang berlainan, politik dalam kehidupan nyata seringkali tidak berbanding lurus dengan ajaran agama. Dari pertentangan tersebut membuat masyarakat berstigma bahwa agama bertentangan dengan politik. Pelaku politik atau

⁵ Ija Suntana, *Dari Internalisasi ke Formalisasi ; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal The Islamic Quarterly Vol. 64 No.1, hlm 117

politisi tidak menggunakan politik sebagai hikmah. Politik sebagai upaya untuk meraih kemaslahatan bersama, tentu jika hal tersebut direalisasikan oleh semua politisi tentunya agama akan mendukung. Jika politisi menggunakan agama sebagai alat politik inilah yang sesungguhnya ketidakbenaran dan melenceng dari upaya meraih kemaslahatan bersama.

Pada prinsipnya, pemerintah memiliki tugas memenuhi hak dasar seluruh rakyatnya. Dalam pandangan HAM, dalam hal hubungan sebuah negara dengan masyarakatnya, rakyat diposisikan sebagai pemegang hak, sedangkan negara adalah pemegang tugas⁶. Namun seringkali tugas pemerintah disempitkan dengan kewenangan yang semena-mena tanpa ada transparansi kepada rakyat selaku pemegang hak dalam bernegara. Pemerintah memainkan peran politik yang bertentangan dengan agama dalam kenyataannya tak berlandaskan agama.

Agama Islam tidak pernah melarang pemeluknya untuk berpolitik bahkan diharapkan agar tokoh-tokoh Islam mampu mensejahterakan umat lewat peran politik yang digelutinya tentunya dengan berpegang teguh dengan agama dan mencurahkan tenaga dan pikiran untuk kemaslahatan umat. Timbulnya tindakan masyarakat merupakan kepekaan terhadap kondisi sosial politik di negara yang kebijakan-kebijakannya tidak menguntungkan rakyat sama sekali bahkan menyengsarakan sehingga timbul aksi demonstrasi sebagai bentuk kepedulian rakyat terhadap kemajuan bangsa.

⁶ Ija Suntana, *Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia : Pendekatan Hukum Tata Negara Islam* , Jurnal Hukum Islam Vol. 19 No.2, (Desember,2021), hlm 202

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Parpol Islam di Indonesia memang dinilai belum bisa mewakili suara rakyat dalam pesta demokrasi yang telah berjalan beberapa zaman. Partai politik Islam juga menjadi salah satu tanda belum bersatunya Islam di negeri ini. Perpecahan yang terjadi saat ini belum menunjukkan kebangkitan Islam khususnya di bidang politik. Muslim di Indonesia hanya unggul dari segi kuantitas tapi minim kualitas, masih banyak rakyat berideologi barat dengan mengesampingkan ideologi agama.

Peta perjalanan partai politik Islam yang masih berada dibawah partai-partai nasionalis dapat dilihat dengan turunnya eksistensi partai politik Islam dan stagnasi suara yang diperoleh dari tahu ke tahun memungkinkan tergulingnya partai Islam jika tak ada perbaikan baik dari segi tubuh maupun luar partai. Partai politik Islam sudah sepantasnya mempunyai visi dan misi yang zahir sebagai partai yang mengatasnamakan Islam dan berasas pada agama Islam. Lambang ka'bah dan bulan bintang sudah seharusnya menjadi cerminan perilaku anggota parpol yang bernaung di dalamnya sebagai upaya menegakkan kembali masa kejayaan Islam di masa mendatang.

Islam sebagai agama yang kaffah, melingkupi dan menaungi semua permasalahan sosial harus menjadi acuan dan diselaraskan dengan tinjauan politik yang seringkali menyimpang dari langkahlangkah yang diinginkan agama demi terwujudnya Islam yang berkualitas dan berkuantitas sebagai penopang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3.2 Kritik dan Saran

Kekurangan pasti ada dan kekhilafan tak pernah luput dari manusia. Kesempurnaan sungguh jauh dari apa yang diimplementasikan penulis disamping minimnya pengalaman dan pemahaman penulis. Oleh karena itu, sumbangsih berupa masukan dari pembaca sangat dibutuhkan agar dapat meningkatkan kemampuan dan menambah wawasan penulis.

Dalam makalah ini penulis hanya mengaplikasikan pandangan dan pemahaman penulis dalam melihat situasi politik di Indonesia ini. Tentunya beberapa pernyataan diambil dan dirujuk dari pendapat para ahli dan sumber-sumber terpercaya untuk membuka cakrawala pemikiran kita betapa pentingnya memahami konsep politik terutama sebagai seorang akademisi.

DAFTAR PUSTAKA

BN, Marbun. 2004. *Kamus Politik*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Budiardjo, Miriam. 1993. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Noer, Deliar,dkk. 1999. *Mengapa Partai Islam Kalah?:Perjalanan Politik Islam dari Pra-Pemilu '99 sampai Pemilihan Presiden*. Jakarta : Alvabet.

Sunarso. 2015. *Membedah Demokrasi : Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta : UNY Press.

Suntana, Ija. , *Dari Internalisasi ke Formalisasi ; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*.
Jurnal The Islamic Quarterly Vol. 64 No.1, hlm 117

_____, *Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia : Pendekatan Hukum Tata Negara Islam* , Jurnal Hukum Islam Vol. 19 No.2, (Desember,2021), hlm 202